

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang mana proses kualitas sumber daya itu sendiri merupakan serangkaian proses peningkatan kualitas pendidikan. Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang akan berlangsung selama sepanjang hayat. Peningkatan sumber daya dalam kualitas pendidikan melalui pergantian peristiwa dan perbaikan rencana pendidikan, kerangka evaluasi, perbaikan kantor, peningkatan sifat pembelajaran, serta kemajuan perolehan bahan ajar.

Selain itu, untuk mencapai tujuan pendidikan yang terjamin sangat ditentukan oleh profesionalitas seorang guru. Untuk dapat diakui sebagai guru atau pendidik profesional, harus dibuktikan dengan sertifikat mengajar sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan martabat dan peran guru sebagai tenaga pendidik dengan fungsi utama meningkatkan mutu pendidikan nasional sebagai pemasok internal yang sangat berperan dalam menghasilkan mutu lulusan (Suwasno, 2019).

Kualitas pendidikan juga tergantung pada beberapa faktor penting, seperti: input, proses, dukungan lingkungan, serta sarana dan prasarana. Dari segi proses,

guru merupakan faktor utama dalam suasana pembelajaran, dimana pelaksanaan tugas secara profesional membutuhkan kompetensi guru. Sebagai seorang guru, harus mempersiapkan beberapa hal melalui pendidikan dalam jangka waktu tertentu dengan seperangkat mata kuliah serta beban SKS yang sesuai dengan jenjang untuk menjadi seorang tenaga pendidik.

Dalam mengoptimalkan kegiatan, aset yang dimiliki harus memiliki tujuan yang diharapkan, seperti halnya dengan ide-ide pengendalian yang tidak hanya tumbuh di dalam zona publik tetapi juga dalam subjek penawaran umum bersama dengan lembaga pendidikan. Ada banyak faktor penting dalam pengoperasian semua aset dan potensi manusia saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya manusia membutuhkan perhatian yang sangat khusus dan kritis. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu pendekatan yang bersifat terintegrasi dan holistik dalam mengubah perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu proses pekerjaan dengan menggunakan serangkaian teknik dan beberapa strategi belajar yang relevan (Ariyanti & Ubaidillah, 2021).

Pendidikan yang berkualitas dapat ditunjukkan oleh kemampuan dalam melancarkan proses pendidikan maupun proses manajemen sekolah yang efektif serta efisien dengan cara memenuhi sumber daya manusia sebagai pelaksana proses pendidikan. Namun di Kabupaten Lumajang dapat dikatakan sumber daya manusianya masih kurang. Hal tersebut disampaikan oleh Agus Setiawan. SE (Selaku Pengamat Ekonomi yang ada di Lumajang) mengenai Indeks Pembangunan Manusia.

“....Saat ini di Lumajang ada kebanggaan semu. Maaf, saya mengatakan ini di awal agar orang mengerti bahwa jika kita terlalu sombong, terkadang kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar sana. Jadi kita terlalu nyaman berada di zona nyaman. Jadi kita tidak tahu perkembangannya. Dan ternyata kualitas kita diantara kota-kota di Jawa Timur justru nomor 3 dari bawah.”, ungkap Samco, panggilan karib Agus Setiawan. (<https://www.pedomanindonesia.com/budayakan-sekolah-agar-ipm-lumajang-tidak-terus-peringkat-bawah/>) di akses pada 08 September 2021 pukul 11.20.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Lumajang menyebutkan rata-rata penduduk Lumajang banyak yang tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu faktor tingkat pendidikan rendah.

“...Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, disebutkan bahwa rata-rata penduduk Lumajang yang mengikuti pendidikan sekolah hanya 11 tahun 2 bulan, kemudian rata-rata pendidikan masyarakat yang berusia 25 tahun ke atas hanya menempuh pendidikan sekolah selama enam tahun,” jelasnya pada Rabu, 9 Februari 2022.” (<https://kabarlumajang.pikiran-rakyat.com/lumajang/amp/pr-423690534/ipm-lumajang-masih-rendah-penyebabnya-minim-minat-wajib-belajar-12-tahun>) di akses pada 02 Juli 2022 pukul 09.45.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator terpenting dalam mengukur keberhasilan sebagai upaya membangun kualitas hidup masyarakat/penduduk dilakukan dengan melakukan perhitungan nilai minimal dan maksimal masing-masing komponen indeks. Ada tiga hal yang dibangun di sekitar dimensi utama, yaitu: umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup yang layak (*a decent standard of living*). Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan jangka panjang dalam pembangunan, serta kemajuan pembangunan manusia, termasuk kecepatan dan pencapaiannya.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 2019-2020

Kabupaten/kota	IPM			Peningkatan IPM		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kota Surabaya	82,22	82,23	82,31	1	1	1
Kota Malang	81,32	81,45	82,04	2	2	2
Kota Madiun	80,88	80,91	81,25	3	3	3
Kabupaten Sidoarjo	80,05	80,29	80,65	4	4	4
Kota Blitar	78,56	78,57	78,98	5	5	5
Kota Kediri	78,08	78,23	78,60	6	6	6
Kota Mojokerto	77,96	78,04	78,43	7	7	7
Kabupaten Gresik	76,10	76,11	76,50	8	8	8
Kota Batu	75,88	75,90	76,28	9	9	9
Kota Pasuruan	75,25	75,26	75,62	10	10	10
Kabupaten Mojokerto	73,53	73,83	74,15	11	12	11
Kabupaten Magetan	73,49	73,92	74,15	12	11	12
Kota Probolinggo	73,27	73,27	73,66	13	13	13
Kabupaten Jombang	72,85	72,97	73,45	14	15	14
Kabupaten Tulungagung	72,62	73,00	73,15	15	14	15
Kabupaten Lamongan	72,57	72,58	73,12	16	16	16
Kabupaten Kediri	71,85	72,05	72,56	17	17	17
Kabupaten Nganjuk	71,71	71,72	71,97	18	19	18
Kabupaten Madiun	71,69	71,73	71,88	19	18	19
Kabupaten Banyuwangi	70,60	70,62	71,38	20	21	20
Kabupaten Blitar	70,57	70,58	71,05	21	22	22
Kabupaten Ponorogo	70,56	70,81	71,06	22	20	21
Kabupaten Ngawi	70,41	70,54	71,04	23	23	23
Kabupaten Malang	70,35	70,36	70,60	24	24	24
Kabupaten Trenggalek	69,46	69,74	70,06	25	25	25
Kabupaten Bojonegoro	68,75	69,04	69,59	26	26	26

Kabupaten/kota	IPM			Peningkatan IPM		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kabupaten Tuban	68,37	68,40	68,91	27	28	28
Kabupaten Pasuruan	68,29	68,60	68,93	28	27	27
Kabupaten Pacitan	68,16	68,39	68,57	29	29	29
Kabupaten Situbondo	67,09	67,38	67,78	30	30	30
Kabupaten Jember	66,69	67,11	67,32	31	31	31
Kabupaten Sumenep	66,22	66,43	67,04	32	32	32
Kabupaten Bondowoso	66,09	66,43	66,59	33	33	33
Kabupaten Pamekasan	65,94	66,26	66,40	34	34	34
Kabupaten Probolinggo	65,60	66,07	66,26	35	35	35
Kabupaten Lumajang	65,33	65,46	66,07	36	36	36
Kabupaten Bangkalan	63,79	64,11	64,36	37	37	37
Kabupaten Sampang	61,94	62,70	62,80	38	38	38

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2019

Pada perkembangan dalam upaya meningkatkan kompetensi yang terus menerus sehingga para guru pada umumnya harus dapat memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 57 Tahun 2021 pasal 20 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sesuai dengan beberapa landasan yang ada kualifikasi akademik pada jenjang pendidikan harus dimiliki oleh seorang guru yang sesuai dengan jenjang, jenis, dan satuan formal dalam jenis penugasan. Dengan demikian kualifikasi akademik yang sesuai akan menjadi relevan dengan mata pelajaran yang ditempuhnya serta kompetensi yang dimilikinya.

Proses belajar dan hasil belajar para peserta didik bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulum, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka

(Agung, 2021). Dalam pemilihan pendekatan, metode, dan teknik yang relevan dengan perkembangan fisik dan psikis peserta didik. Sehingga dapat menghasilkan kemampuan berkomunikasi dalam ruang lingkup akademik, baik secara lisan maupun tulisan.

Kompetensi guru dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menonjol dalam bentuk perilaku cerdas serta sikap tanggung jawab yang dimiliki seorang guru. Seorang guru juga dituntut dalam menjalankan profesinya sebagai kemampuan menguasai mata pelajaran dan berinteraksi sosial dengan guru lain, kepala sekolah bahkan masyarakat luas. Pembangunan yang tidak memadai dan pendidikan yang berkualitas akan membuat negara Indonesia tertinggal, sehingga salah satu aspek penting dari pengembangan profesional adalah ketersediaan guru yang profesional. Guru merupakan bagian integral dari sistem pendidikan mikro yang sangat strategis dan memainkan banyak peran dalam proses pendidikan yang lebih luas, terutama di sekolah.

Tabel 1.2 Data Kompetensi Guru di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Nama Wilayah	SD	SMP	SMA	SMK	Pedagogik	Profesional	Rata-rata
Kabupaten Sampang	52,56	56,51	61,03	55,36	49,33	56,27	54,19
Kabupaten Sumenep	53,52	58,77	62,06	56,07	50,21	57,69	55,45
Kabupaten Pamekasan	55,30	57,65	59,04	54,86	50,46	58,24	55,91
Kabupaten Bangkalan	53,80	60,12	62,93	56,04	51,08	58,39	56,20
Kabupaten Situbondo	55,09	60,24	65,47	57,73	52,04	59,00	56,91
Kabupaten Bondowoso	54,97	61,16	63,59	60,44	52,20	59,28	57,16
Kabupaten Probolinggo	56,51	60,11	63,25	57,68	53,12	59,89	57,86
Kabupaten Jember	56,42	60,55	66,31	60,20	53,09	60,73	58,44
Kabupaten Banyuwangi	58,14	60,78	64,16	58,36	53,44	61,77	59,27

Nama Wilayah	SD	SMP	SMA	SMK	Pedagogik	Profesional	Rata-rata
Kabupaten Trenggalek	56.25	64.13	68.64	60.55	55.01	61.85	59.80
Kabupaten Bojonegoro	58.83	61.48	65.05	59.01	54.31	62.51	60.05
Kabupaten Lamongan	58.78	62.05	64.11	58.10	54.85	62.37	60.12
Kabupaten Madiun	57.67	63.23	69.96	59.59	55.39	62.31	60.24
Kabupaten Nganjuk	58.63	62.66	67.24	58.72	54.36	62.90	60.33
Kabupaten Lumajang	58,71	62,64	69,76	62,41	55,04	62,90	60,54
Kabupaten Ngawi	58.80	64.61	67.26	59.09	54.54	63.42	60.76
Kabupaten Pasuruan	59.55	63.09	68.24	61.64	55.64	63.32	61.01
Kabupaten Blitar	59.41	63.64	68.35	61.23	55.79	63.28	61.03
Kabupaten Malang	58.93	64.31	68.42	61.18	55.45	63.43	61.03
Kabupaten Magetan	59.77	63.20	67.47	59.62	55.19	63.75	61.18
Kabupaten Tuban	59.40	64.21	64.49	59.52	55.57	63.60	61.19
Kabupaten Pacitan	58.99	64.51	67.86	62.49	56.22	63.62	61.40
Kabupaten Kediri	60.34	65.99	68.79	59.25	55.82	64.76	62.08
Kabupaten Mojokerto	61.91	63.07	67.76	58.86	56.38	64.66	62.17
Kota Pasuruan	59.25	65.62	67.95	61.37	57.72	64.11	62.20
Kabupaten Tulungagung	60.50	64.14	70.17	62.43	55.76	64.99	62.22
Kota Probolinggo	60.49	66.94	70.99	62.66	57.87	65.18	62.99
Kabupaten Ponorogo	61.27	65.82	68.88	61.40	57.39	65.43	63.02
Kota Madiun	61.17	66.01	70.41	61.43	59.61	65.74	63.90
Kabupaten Sidoarjo	62.50	64.65	68.80	60.84	57.24	65.67	63.14
Kabupaten Gresik	62.26	65.65	69.03	61.37	56.85	66.04	63.28
Kota Surabaya	63.82	63.54	68.99	60.29	57.85	65.90	63.48
Kabupaten Jombang	63.52	66.10	69.16	60.85	57.99	66.33	63.83
Kota Kediri	63.72	63.78	69.20	62.29	58.55	66.68	64.24
Kota Blitar	66.70	65.12	70.67	63.45	60.34	67.94	65.66
Kota Batu	64.17	68.06	70.68	65.05	60.65	68.13	65.98
Kota Mojokerto	67.81	66.41	70.45	62.90	61.40	68.40	66.30

Nama Wilayah	SD	SMP	SMA	SMK	Pedagogik	Profesional	Rata-rata
Kota Malang	66.60	67.25	74.05	67.45	62.07	69.72	67.42

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud 2019

Dalam meningkatkan kualitas guru, perlu dilakukan sistem pengujian terhadap guru. Dengan pengujian ini diharapkan untuk mengetahui kompetensi guru yang dinamakan Uji Kompetensi Guru (Dinyanti, 2016). Pemerintah Kabupaten Lumajang mengadakan program peningkatan kompetensi guru ini diharapkan memberikan mafaat sebagai pendorong kegiatan dalam hasil belajar serta memenuhi standar kualifikasi guru yang ada. Karena sebagian besar kegiatan pembelajaran dan hasil belajar siswa tidak hanya ditentukan oleh manajemen sekolah, kurikulum, serta sarana prasarana melainkan ditentukan oleh guru.

Dalam data pokok pendidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyebutkan bahwa ada sebanyak 4.048 guru Sekolah Dasar (SD). Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). Dilihat dari capaian APM pada jenjang SD/MI ditahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 0,61% dari pada tahun 2020. Sedangkan APK juga tidak berbeda jauh dengan APM yang mengalami penurunan pada tahun 2021 sebanyak 1,04% dari tahun 2020, hal ini disebabkan masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah karena banyaknya masyarakat yang belum menamatkan pendidikan mulai dari faktor ekonomi, sosial, dan juga faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lumajang			
	Angka Partisipasi Murni		Angka Partisipasi Kasar	
	2020	2021	2020	2021
SD/MI	96,85	96,24	108,53	107,49
SMP/MTs	79,03	79,44	94,11	96,62
SMA/SMK/MA	44,91	46,50	60,50	63,68

Grafik 1.1 Data APM dan APK Kabupaten Lumajang

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang 2021

Kurang maksimalnya sumber daya manusia dalam perekrutan seorang guru menjadi salah satu faktor kualitas guru menjadi rendah. Pada dasarnya perbaikan dalam meningkatkan manajemen sumber daya manusianya sendiri sangat berpengaruh sebagai perbaikan dari kualitas dan capaian mutu pendidikan. Di kabupaten Lumajang sebanyak 600 guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) akan memasuki masa purna tugas pada akhir tahun 2023, dimana hal ini menyebabkan sekolah Negeri kehilangan tenaga pendidik. Ada sekitar 603 Sekolah Dasar (SD) untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dalam menyampaikan proses belajar mengajar.

Kompetensi guru dapat dilihat dari beberapa faktor salah satunya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional pada pasal 6, bagi standar lulusan sekolah dasar difokuskan terhadap nilai-nilai Pancasila, literasi dan numerasi Kabupaten Lumajang menurut data

Badan Pusat Statistik tahun 2021 memiliki sebanyak 11,63 40 persen terbawah, 10,49 40 persen teratas dan 8,96 20 persen teratas. Sehingga dengan ini pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan bimbingan teknis bagi guru SD/MI sampai SMP dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan bagi sekolah dasar dan menengah agar menghasilkan kualitas mengajar yang baik serta berdampak pada hasil yang ingin dicapai dapat terealisasikan.

Pada beberapa implementasi program yang dijalankan di Kabupaten Lumajang masih dijumpai kurang jelas dan kurang tegas dalam pelimpahan wewenang dari tingkat pimpinan kepada bawahan, serta kurang sesuai penunjukan bidang atau sub bagian untuk melaksanakan program-program kerja yang dilaksanakan (Subandi, 2018). Hal ini juga dijelaskan, bahwa intensitas komunikasi dan kerjasama antar bidang dan sub bagian masih memerlukan peningkatan terutama terkait dengan implementasi program yang pelaksanaannya membutuhkan kerjasama dan kebersamaan antar bidang maupun antar sub bagian. Tidak hanya itu, adanya perbedaan struktur organisasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengakibatkan efektivitas penanganan program-program layanan pendidikan yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurang memadai, karena ditempatkan dan ditangani oleh bidang atau sub bagian yang kurang relevan.

Salah satu masalah pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini adalah rendahnya pendidikan guru. Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi

guru dalam jabatan, setiap guru dituntut untuk meningkatkan profesionalitas guru. Dengan istilah lain, setiap pengajar wajib meningkatkan kompetensi menjadi seorang pengajar, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial juga profesional. Dengan kompetensi tersebut, guru diharapkan mampu merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan dengan baik dan mengembangkan profesinya.

Standar kompetensi guru yang telah ditetapkan harus dimiliki oleh guru secara maksimal agar proses belajar mengajar dapat menjadi lebih efektif. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional. Jika guru dapat menguasai dan mengimplementasikan seluruh kompetensi dalam proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar sekolah, diharapkan menjadi guru yang efektif. Guna mencapai tujuan dalam melaksanakan pembelajaran kompetensi guru harus lebih ditingkatkan.

Untuk meningkatkan kualitas guru, diperlukan sistem pengujian terhadap guru. Dalam menumbuh kembangkan atau membina profesi kepelatihan itu sendiri membutuhkan beberapa tahapan yang terdiri dari: 1) Pembelajaran lebih lanjut. 2) Menghimbau ikut serta mengusahakan sarana dan fasilitas sanggar-sanggar seperti Sanggar Pemantapan Kerja. 3) Berpartisipasi dalam mencari cara

bagi guru untuk mengakses peluang. 4) Berpartisipasi dalam pengembangan peluang guru. Guru yang mengikuti seminar pendidikan sesuai dengan minatnya. Sanksi yang ditujukan untuk mengembangkan keterampilan profesional. 5) Secara teratur mengadakan diskusi ilmiah di sekolah. 6) Mengembangkan metode pendidikan kelompok bagi guru di bidang pendidikan (Nurlaeli & Saryono, 2018).

Kualifikasi seorang guru merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan seorang guru melalui pendidikan khusus keterampilan. Pada setiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik yang berhubungan dengan bidang keilmuan yang relevan yang akan mereka ajarkan disekolah sehingga mereka akan disebut kompeten dalam bidang pekerjaannya. Guru juga memiliki kompetensi profesional yang tercermin dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan materi serta mengembangkan materi sesuai dengan perkembangan pendidikan.

Dalam pengembangan kualitas pendidikan sangat dibutuhkan desain pembelajaran yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat memperkuat *softskill* bagi para tenaga pendidik. Desain pembelajaran ini dapat meliputi pemilihan pendekatan, model strategi dan metode-metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan peserta didik maupun karakteristiknya. Berdasarkan hasil uji kompetensi guru dapat diketahui bagaimana kemampuan rata-rata para guru dengan aspek yang mana perlu ditingkatkan dan siapa yang perlu pembinaan secara berkelanjutan, serta siapa yang mencapai standart kemampuan minimal.

Pada Kabupaten Lumajang program peningkatan kompetensi dilaksanakan sejak tahun 2017, program ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan

Daerah Nomor 2 tahun 2015 pasal 17 yang menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam mendukung keberhasilan program tersebut guru tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang mengadakan sebuah bimbingan teknis serta *workshop* yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) hari. Hal ini sebagai fasilitas pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh Kelompok Kerja Guru maupun Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dengan dilaksankannya program tersebut harus didasarkan pada jumlah guru yang diikutsertakan sehingga semua guru dapat merasakan manfaat dari program pengembangan.

Program pengembangan yang sangat penting adalah mempertimbangkan sekolah wajib yang dapat mencapai tujuan tersebut. Agar pelaksanaannya tepat, perlu memperhatikan aspek tujuan, penggunaan kurikulum, pendukung proses pengembangan program, aspek evaluasi yang akan dilakukan setelah selesainya program oleh peserta, pengajar, waktu, dan metode (Parenrengi, 2018). Dengan implementasi yang konsisten dengan prosedur, sistem ini akan berjalan sesuai dengan keinginan yang telah ditetapkan. Implementasi yang baik bahkan dapat memberikan keuntungan yang sesuai bagi para pengikut program sekolah sebagai penyelenggara, sehingga keinginan yang diinginkan tercapai. Oleh karena itu, penerapan program peningkatan pelatih yang sangat baik akan menghasilkan ledakan dalam kapasitas guru.

Dengan demikian, guru merupakan salah satu pihak yang menentukan dan memegang peranan penting dalam kemajuan pendidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Muljani, 2017). Kebergantungan pendidikan sangat berpedoman pada keberadaan guru yang bermutu. Berdasarkan uraian dasar di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah yang terjadi pada guru mengenai pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Lumajang dengan upaya yang ditekankan pada perbaikan sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Peningkatan Kompetensi dalam Memenuhi Standar Kualifikasi Pendidikan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lumajang”**.

1.277. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas dapat dijelaskan bahwa rumusan masalah yang akan dikaji lebih dalam oleh penulis pada penelitian ini adalah **“Bagaimana implementasi program peningkatan kompetensi dalam memenuhi standar kualifikasi pendidikan bagi guru Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lumajang?”**

1.278. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah **“Untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan program peningkatan kompetensi dalam memenuhi standar kualifikasi pendidikan bagi guru Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten Lumajang”**.

1.279. Manfaat Penelitian

- a) Bagi Penulis Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan tambahan wawasan yang mendalam terkait Implementasi Program Peningkatan Kompetensi dalam Memenuhi Standar Kualifikasi Pendidikan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lumajang.
- b) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Untuk menambah referensi dan literatur pada perpustakaan serta dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang akan dilakukan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- c) Bagi Pemerintah/instansi/Dinas Organisasi/Pihak Lainnya Yang terlibat Sebagai bahan evaluasi serta kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Implementasi Program Peningkatan Kompetensi Guru dalam Memenuhi Standar Kualifikasi Pendidikan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lumajang sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.